



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
UNIT KERJA : BADAN PENGHUBUNG DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENDRIE DJOKO SATRIO
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 249711

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.994.500.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000		
2. Tanah Seluas 510 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 153.000.000		
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000		
5. Tanah Seluas 270 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	180.000.000
1. MOBIL, HONDA ACCORD SEDAN Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
2. MOBIL, MERCEDES BENZ C 200 SEDAN Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
3. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
4. MOBIL, NISSAN SERENA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	75.545.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	21.150.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.271.195.000
III. HUTANG	Rp.	134.218.589
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.136.976.411

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.